

NARASI ANTI-IMIGRAN DALAM KRISIS PENGUNGSI EROPA TAHUN 2015 SEBAGAI REFLEKSI ATAS KRISIS IDENTITAS EROPA

Muhammad Iqbal Yunazwardi

Universitas Indonesia
iqbal.yunazwardi@yahoo.com

Abstract

The Refugee Crisis in 2015 has considered creating a major problem to European society. This issue was capitalized by far-right political movement to create anti-immigrant narratives. Right-wing political groups have linked the anti-immigrant narratives to the negative impact European societies have had on security, politics, economics and social culture. In this article, the author argues that the increase of anti-immigrant narratives also entails a crucial aspect that is important to analyze, which is the fragile construction of the European identity. The integration of European identity, multiculturalism, and social cohesion are the important aspects of such identity. This is more apparent nowadays as the immigrant population is increasing. The author suggests two points of view on this matter: the discussion on migrants in Europe and how the anti-immigrant narrative dominates the transition discourse contestation in Europe, especially how the narratives develop after the 2015 refugee crisis.

Keywords: *Europe, Migration Crisis, European Identity, Multiculturalism, Anti-Immigrant Narrative*

Abstrak

Krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015 dianggap telah menciptakan masalah utama bagi masyarakat Eropa. Masalah tersebut dikapitalisasi oleh kelompok politik sayap kanan jauh untuk membentuk narasi anti-imigran. Kelompok politik sayap kanan jauh mengaitkan narasi anti-imigran dengan dampak negatif yang dirasakan masyarakat Eropa terhadap kondisi keamanan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam artikel ini, penulis melihat bahwa dinamika peningkatan narasi anti-imigran juga menggambarkan sebuah aspek sentral yang penting untuk dianalisis, yaitu peningkatan narasi anti-imigran menggambarkan konstruksi identitas Eropa yang rapuh. Artikel ini mencoba menjelaskan bahwa terdapat masalah penting dalam proses integrasi identitas Eropa, terutama dalam aspek penguatan multikulturalisme dan kohesi sosial. Masalah tersebut semakin terlihat jelas seiring dengan masuknya kedatangan imigran dan meningkatnya narasi anti-imigran. Sebelum membahas aspek tersebut, penting untuk melihat dua poin penting lainnya. Pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana konteks migran di Eropa. Kedua, bagaimanakah narasi anti-imigran mampu menguasai kontestasi diskursus migrasi di Eropa pasca krisis pengungsi 2015 dan bagaimana narasi tersebut dibentuk.

Kata kunci: *Eropa, Krisis Migrasi, Identitas Eropa, Multikulturalisme, Narasi anti-imigran*

Pendahuluan

Krisis migrasi Eropa berupa arus gelombang pengungsi mencapai puncaknya pada tahun 2015. Menurut *United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR)*, terdapat beberapa negara yang

berkontribusi terhadap arus migrasi dengan alasan utama yaitu negara yang sedang mengalami kondisi perang dan kemiskinan di Timur Tengah maupun negara-negara di Afrika. Dalam penerimaan arus migran di Eropa, Jerman menjadi negara terbesar yang memberikan kuota kepada pengungsi. Pada tahun 2015, Jerman telah menerima total 476 ribu aplikasi pengungsi (BBC, 2016). Sedangkan sebagai negara penerima pertama pengungsi, Hungaria menerima total 177 ribu aplikasi pengungsi. The *International Organization for Migration* (IOM) mengestimasi bahwa satu juta imigran datang ke Eropa melalui laut, dan 35 ribu pengungsi datang melalui jalur darat (BBC, 2016).

Kedatangan pengungsi dan pekerja migran tersebut menciptakan dinamika tersendiri bagi negara-negara di Eropa. Hal ini ditandai dengan kebangkitan partai kanan jauh, kebijakan-kebijakan yang tidak mengakomodasi kepentingan migran, hingga upaya untuk mensekritisasi arus migrasi tersebut. Selain itu, krisis pengungsi juga memecah suara anggota-anggota Uni Eropa (UE) dengan kebijakan terhadap imigran yang cukup beragam. Migrasi telah menjadi bentuk politisasi di Eropa. Posisi melihat bentuk imigran sangat berdampak pada narasi yang diciptakan perihal keamanan nasional, kesejahteraan masyarakat, hingga ketahanan budaya nasional. Upaya ini telah membawa UE ke dalam kondisi krisis identitas. Di mana, masyarakat Eropa tidak lagi secara maksimal mampu menyerap nilai-nilai ke-Eropa-an, terutama terkait dengan kebijakan regional dalam penanganan migrasi. Krisis identitas dapat diidentifikasi dengan bangkitnya kekuatan sayap kanan jauh. Kekuatan politik tersebut berusaha untuk membangun narasi perlawanan terhadap keberagaman

Eropa, anti-imigran, islamophobia, hingga menolak percaya terhadap UE (Andre, 2015).

Beberapa artikel memiliki pandangannya tersendiri terhadap posisi narasi anti-imigran terhadap krisis identitas. Migrasi telah menjadi sumber daya politik yang bermanfaat bagi kelompok politik sayap kanan (Grande, Schawzbozl, & Fatke, 2019). Sumber daya tersebut menggunakan logika politik yang berperan penting dalam mendefinisikan tren narasi anti-imigran (Lutz, 2019). Dalam hal ini, narasi anti-imigran erat kaitannya dengan ancaman kemakmuran, kesehatan, dan integritas budaya di masing-masing negara. Gelombang migrasi yang menuju Eropa adalah bagian terintegrasi dengan faktor-faktor yang cukup jelas. Seperti contoh, Castles menyatakan bahwa faktor utama perpindahan manusia dikarenakan faktor globalisasi neoliberal. Globalisasi telah menciptakan fenomena dimana manusia berpindah dari “selatan” menuju “utara” untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Castles, 2012). Akan tetapi, proses politik yang terjadi membuat kelompok imigran berada dalam posisi sulit. Wacana media Eropa terhadap kelompok imigran seringkali menggambarkan bentuk-bentuk diskriminasi. Seperti contoh, framing politik yang dilakukan memposisikan kelompok imigran sebagai pihak penting yang berperan dalam mengganggu ketertiban umum. Melalui proses politik yang telah dijelaskan di atas, Kelompok imigran dibingkai oleh media sebagai ancaman ekonomi, budaya hingga politik komunitas Eropa (Eberl, 2018).

Perpindahan ini memunculkan masalah yang kompleks di Eropa. Permasalahan utama adalah tidak ada satupun model identitas Eropa yang konsensual. Pembentukan identitas Eropa

selalu berbenturan oleh sudut pandang aspek lokal, regional, etnis, dan nasional (Jenkins, 2008). Hal ini berdampak pada kurangnya legitimasi politik UE atas kebijakan penerimaan imigran dan pengungsi. Akan tetapi, di beberapa negara, pemerintah mampu untuk mengadopsi konsep yang ditawarkan oleh UE dalam mengelola konteks imigran. Seperti contoh, politik domestik Irlandia memiliki kepentingan solidaritas Eropa yang besar sehingga upaya pembukaan ruang bagi kedatangan imigran dijamin oleh negara mengikuti arahan yang diberikan oleh UE (Elliot, 2019). Perbedaan penerimaan negara-negara Eropa terhadap kelompok migran didasarkan pada inklusivitas dan eksklusivitas identitas nasional (Creighton, 2015). Perbedaan ini menentukan kebijakan migrasi yang dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan menurut Zapatta-Barrero (2019), penerimaan imigran dan pengungsi di Eropa mendorong organisasi regional dan masyarakat untuk mengaplikasikan pendekatan interkulturalisme. Pendekatan ini dirasa penting karena mampu mempengaruhi anggota-anggota negara UE untuk menciptakan tata kelola migrasi yang lebih ramah dan mampu memanusiakan para pengungsi melalui penghargaan atas perbedaan.

Kedatangan imigran adalah upaya terpenting dalam menganalisis ketahanan dari pembangunan identitas Eropa yang selama ini sudah bekerja. Proyek multikulturalisme yang telah ditanamkan dalam berjalannya proses integrasi Eropa mendapatkan tantangan besar pasca krisis pengungsi yang terjadi. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk membangun wacana bahwa terdapat masalah utama seiring dengan meningkatnya intensitas narasi anti-imigran. Hipotesis penulis adalah narasi anti-imigran

yang muncul dapat menggambarkan bentuk identitas Eropa yang rapuh. Penerimaan atas keberagaman terhalang atas wacana populis yang menyudutkan posisi imigran. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan erat antara narasi anti-imigran dengan krisis identitas Eropa yang saat ini sedang berjalan. Batasan penelitian penulis ialah narasi anti-imigran yang ditimbulkan pasca krisis pengungsi Eropa yaitu pasca tahun 2015. Penulis akan mengelaborasi berbagai narasi yang dibangun oleh pemimpin negara, tokoh politik, hingga sumber-sumber pemberitaan media dan penelitian-penelitian terkait.

Kerangka Pemikiran

Migrasi Internasional

Migrasi adalah salah satu bagian dari proses transformasi struktur dan institusi yang muncul melalui perubahan besar dalam hubungan politik, ekonomi, dan sosial global. Wacana politik dominan melihat migrasi sebagai masalah yang perlu diperbaiki dengan kebijakan yang tepat. Beberapa literatur bahkan menyebutkan migrasi sebagai hal yang berbahaya dan disfungsional. Hal ini dijelaskan sebagai bentuk bias migrasi atau *sedentary bias*. *Sedentary bias* menunjukkan bahwa tradisi diskriminasi terhadap kelompok migran selalu dilanggengkan sebagai ancaman bagi kemakmuran dan ketertiban umum (Castles, 2010)

Migrasi selalu dikaitkan dengan beban ekonomi, keamanan, dan gangguan atas negara kesejahteraan. kebudayaan dan kompleksitas agama telah menjadi tantangan bagi modernitas identitas nasional dan kemasyarakatan di Eropa. Berakhirnya perang dingin menjadi titik balik terciptanya arus balik masyarakat di Asia dan Eropa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di Eropa. Globalisasi

menjadi alasan utama kebutuhan pencarian suaka menjadi pekerja migran (Castles, 2012). Selain itu sejarah anti-imigran, etnis dan rasisme harus dikaitkan dengan bagaimana pembentukan negara bangsa. Migrasi telah menjadi aspek normal kehidupan sosial dan terutama perubahan sosial sepanjang sejarah. Dalam zaman penjajahan, migrasi paksa telah dilakukan oleh negara-negara kolonial untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara.

Sejak abad keenam belas, tercipta percepatan perubahan perkembangan pasar dunia kapitalis. Migrasi paksa telah dilakukan dalam upaya pembentukan negara-bangsa, ekspansi kolonialisme dan imperialisme yang melibatkan konflik hingga kekerasan. Castle berpandangan bahwa migrasi bukanlah menjadi masalah utama, tetapi ketimpangan globalisasi neoliberal lah sebagai sumber utamanya. Dalam pola ekonomi seperti ini, terjadi ketidaksetaraan ekonomi pada konteks pembangunan Utara-Selatan (Castles, 2012).

Konstruksi Identitas Regional dan Penerimaan Imigran

Dalam perkembangan diskursus identitas, definisi identitas mengalami pergeseran ke arah politik pengakuan, liberalisme yang ramah, dan dialog antar budaya (Kymlicka, 1995; Habermas, 1993). Namun, perhatian utama dalam diskursus ini adalah faktor penting dari tata kelola dialogis dalam masyarakat multikultural kontemporer. Dalam masyarakat multikultural, identitas saling menyesuaikan satu sama lain dan secara bertahap dimodifikasi. Negosiasi identitas, mengacu pada transformasi identitas secara bertahap dalam konteks vital baru, menghasilkan bentuk-bentuk baru hibridisasi budaya. Peran yang diwujudkan, dan perilaku spesifik yang terkait dengannya, tidak diragukan lagi berubah

seiring melintasi ruang dan waktu (La Barbera, 2015). Akibatnya, persepsi, representasi, dan definisi identitas juga berubah. Pergeseran ini sangat eksplisit dalam kasus imigran karena kelompok migran pada umumnya menganggap identitas sebagai sesuatu yang cair dan berganda. Menurut Jenkins (2008), identitas lebih baik digambarkan sebagai sesuatu yang “dilakukan” individu daripada sesuatu yang mereka “miliki”, sebagai proses daripada sebagai properti semata. Oleh karena itu, identitas adalah hasil negosiasi kondisi yang diberikan konteks pribadi sosial, hubungan, dan kerangka kerja institusional.

Dari pemaparan diskursus identitas di atas dan keterkaitannya dengan studi kasus artikel ini, penting untuk melihat bagaimana pembentukan identitas Eropa dalam beberapa hal. Pertama, penting untuk melihat bagaimana pembentukan artefak kultural sejarah Eropa membentuk ide-ide pembentukan identitas regional. Kedua, penting melihat peran UE sebagai institusi yang menjamin proses keberlangsungan pembentukan identitas. Ketiga, penting untuk melihat tantangan yang dihadirkan dalam proses pembentukan tersebut. Tantangan ini bisa dilihat dari bagaimana identitas Eropa mampu menerima perbedaan kultural berbagai kelompok minoritas dengan segala kompleksitasnya.

Pembahasan

Fenomena Migrasi dan Kebijakan Anti-Imigran Di Eropa

Konvensi PBB tahun 1951 telah menjelaskan bahwa motif-motif perpindahan manusia didasari oleh ketakutan karena alasan ras agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial hingga opini politik yang membahayakan. Motif ini merepresentasikan

pengungsi sebagai aktor yang berusaha melakukan perpindahan untuk mendapatkan perlindungan di negara tujuan. Tetapi, perpindahan tersebut tidak bisa sepenuhnya berkaitan dengan pengungsi. Pada era globalisasi, perpindahan manusia dapat dimaknai secara rasional, yaitu berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa. Jalan ini terbuka saat negara-negara di Eropa membuka peluang besar bagi para migran untuk bekerja di berbagai sektor yang tidak ingin dikelola oleh penduduk setempat (Castles, 2012). Selain itu, migrasi adalah proses yang sangat terstruktur yang dibangun melalui pola, konteks historis hingga keputusan individu yang rasional. Bola panas permasalahan imigran pada akhirnya adalah bagaimana organisasi regional, pemerintah negara, hingga masyarakat mampu untuk bersinergi mengelola tata kelola migrasi yang mampu memberikan kepastian HAM bagi para pengungsi maupun migran tak teratur. Tetapi dalam penerapannya, terdapat banyak masalah yang terjadi.

Kebijakan anti-imigran sendiri telah terjadi sejak tahun 1970-an. Pada saat itu, terdapat sebuah fenomena migrasi yang meningkat, yaitu reuni keluarga. Reuni keluarga adalah bermigrasinya individu untuk berkumpul bersama keluarganya yang telah lebih dulu menetap di negara-negara Eropa. Fenomena ini di respon oleh Pemerintah Perancis dan Jerman yang berusaha membatasi arus masuk pasangan dan anak-anak migran, tetapi hal tersebut terhalang karena melawan konstitusi dan sistem hukum negara demokratis (Castles, 2012). Pada awal 1990-an, perkembangan sejarah migrasi semakin meningkat seiring dengan hadirnya proses globalisasi dan motif ekonomi. Pada tahun 1992, total pengungsi yang mengajukan suaka ke negara-negara di Eropa mencapai

695.000 jiwa (Pewresearch, 2016). Perpindahan dilakukan oleh banyak penduduk Eropa Timur pasca pendudukan Uni Soviet. Negara yang dituju pengungsi tersebut yaitu negara-negara Eropa Barat seperti Belanda, Jerman maupun wilayah Eropa lainnya seperti Swedia.

Peningkatan ini juga ditandai dengan masifnya mobilisasi kelompok kanan ekstrim yang hadir sebagai resistensi atas gelombang migrasi tersebut. Pada gerakan akar rumput, kelompok sayap kanan memberikan tekanan terhadap pengungsi seperti penyerangan asrama pencari suaka, rasisme, hingga penyerangan fisik secara personal terhadap kelompok migran yang telah menetap. Untuk menutup ruang kesempatan politik yang dimiliki kelompok sayap kanan, kelompok tengah yang mayoritas memimpin negara-negara Eropa didorong untuk menciptakan kebijakan yang populis dan pragmatis. Salah satunya dengan memberlakukan aturan mengenai pembatasan penerimaan suaka dan kebijakan visa untuk menahan laju migrasi tidak teratur (Zimmerman & Spring, 2016). Upaya ini sebelumnya telah dilakukan pada tahun 1985. Di mana, negara anggota UE sepakat untuk mengesahkan Konvensi Schengen. Tujuan utama kesepakatan ini adalah untuk memungkinkan kebebasan bergerak bagi warga negara UE di dalam wilayah regional UE. Untuk membuat prosedur visa bersama bagi semua anggota, dan untuk memelihara dan mendistribusikan informasi mengenai keamanan perbatasan. Konsekuensi yang dilahirkan dari perjanjian tersebut antara lain: kebebasan mobilitas warga negara UE untuk berpindah, izin kerja, dan menetap di negara lain di dalam zona UE. Warga negara UE yang telah berpindah dapat hidup untuk tinggal di negara lain tanpa mengajukan kewarganegaraan. Di sisi

lain, terdapat tujuan lain atas kesepakatan tersebut, yaitu dengan menghambat pergerakan individu untuk memasuki wilayah Zona UE (Zimmerman & Spring, 2016).

Penguatan Narasi Anti-Imigran di Eropa Pasca Krisis Pengungsi Tahun 2015

Aktor utama yang membangun narasi anti-imigran adalah kekuatan politik sayap kanan jauh. Kedatangan pengungsi dalam jumlah yang besar pada tahun 2015 membuat kelompok politik tersebut mendapatkan peningkatan dukungan dari berbagai masyarakat di masing-masing negara. Di Inggris, *United Kingdom independence Party* (UKIP) berhasil memenangkan referendum Brexit dengan kampanye anti-imigran. Salah satu narasi yang dikumandangkan dalam kampanye Pro Brexit yang dilakukan UKIP yaitu “UE telah gagal, kita harus membebaskan diri dan mengambil kendali atas perbatasan kita (PRI, 2016).” Reaksi mayoritas publik Inggris dipengaruhi jelas oleh narasi tersebut. Kondisi ini juga didukung oleh serangan teror yang terjadi di Paris pada November 2015. Bahkan 44% penduduk Inggris yang menganggap bahwa Inggris harus menutup perbatasan sepenuhnya untuk para pengungsi, dan jumlah persentase tersebut menjadi pemilih tetap Pro Brexit (BBC, 2016).

Selanjutnya, Partai Front Nasional Perancis berhasil meraih popularitas atas kebijakan diskriminatifnya terhadap kelompok migran minoritas. Pemimpin partai Front Nasional, Marie Le Pen menekankan pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi masuknya jumlah imigran baru yang masuk ke Perancis. Dalam berbagai kampanye, Le Pen sering mempromosikan slogan “on

es Chez Nous!" (ini negara kami) sekaligus menekankan ancaman nyata terhadap negara Perancis, yaitu globalisasi ekonomi, migrasi, dan fundamentalisme Islam (The Guardian, 2020). Selain itu dalam pembaruan manifesto Partai Front Nasional tahun 2017, terdapat visi besar untuk melakukan pengurangan besar-besaran terhadap migran legal. Narasi yang dibangun Le Pen adalah *"mereka tidak punya alasan untuk tinggal di Perancis, orang-orang ini melanggar hukum begitu mereka menginjakkan kaki di tanah Perancis* (Financial Times, 2020).

Di Italia, koalisi partai kanan tengah dan jauh yang dimotori oleh Lega Nord berhasil merebut tampuk kepemimpinan. Matteo Salvini, pemimpin Lega Nord sekaligus Wakil Perdana Menteri Italia tahun 2018-2019 memiliki posisi yang cukup keras melawan kebijakan migrasi UE dan gelombang krisis migrasi. Upaya tersebut terlihat dalam posisi Salvini melihat kebijakan migrasi yang telah ditetapkan oleh UE. *"Alih-alih membantu Italia, UE hanya akan membebani kami. Pemerintah Italia tidak akan menaati reformasi Peraturan Dublin dan kebijakan suaka baru karena akan membebani negara-negara pertama penerima pengungsi* (DW, 2018)." Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Salvini saat menolak hasil reformasi Peraturan Dublin yang dilakukan oleh UE. Melalui peraturan Dublin, UE berusaha untuk membantu negara-negara di garis depan dalam mengelola arus migrasi, salah satunya dengan mendirikan *hotspot*. *Hotspot* adalah tempat di mana migran diidentifikasi sebelum ditampung oleh negara penerima lainnya. Akan tetapi menurut Salvini, UE telah gagal karena negara-negara Eropa Timur menolak untuk mendaftarkan sistem kuota tersebut.

Tekanan besar terhadap narasi anti-imigran terlihat juga mempengaruhi pemimpin-pemimpin negara Eropa yang

memiliki pandangan politik kiri-tengah, maupun tengah. Di mana sebelumnya, tokoh politik tersebut tidak berposisi sebagai kelompok anti-imigran. Presiden Perancis, Emmanuel Macron merupakan rival utama kelompok sayap kanan Le Pen. Akan tetapi, Macron memiliki kebijakan migrasi yang sejalan dengan rivalnya, yaitu menghilangkan akses layanan medis kepada para pencari suaka dan memotong jumlah pencari suaka. Alasan utama Macron adalah untuk melindungi kelas pekerja. *"Kelas menengah kami tidak memiliki masalah dengan imigrasi, tetapi kaum kiri tidak ingin melihat masalah ini dan berdampak pada perpindahan pandangan politik kelas pekerja menjadi ekstrim kanan, (Washington Post, 2019)"* ujar Macron. Pernyataan tersebut merupakan gambaran narasi yang dimiliki oleh kelompok kiri-tengah yang berusaha taktis dan pragmatis akibat tidak populisnya kebijakan pro imigran.

Wacana alternatif sendiri lahir dari beberapa politisi Eropa yang menganggap bahwa faktor kemanusiaan dan kesolidan UE adalah kunci penyelesaian masalah migrasi. Yvette Cooper, anggota oposisi Partai Buruh Inggris menyatakan bahwa kampanye anti-imigran yang dilakukan oleh UKIP adalah bentuk dari kejahatan atas kemanusiaan. *"Mereka mengeksploitasi kesengsaraan pengungsi Suriah dengan cara yang tidak jujur dan bermoral (BBC, 2016)."* Sedangkan dukungan terhadap upaya pengelolaan migrasi UE juga dilontarkan oleh Pemimpin Partai Hijau Britania Raya, Philippe Lamberts. *"Sejak tahun 2015, kebijakan migrasi UE secara bulat adalah salah satu dari Benteng Eropa (FT, 2016)."* Selain itu, narasi dukungan terhadap pengelolaan migrasi di UE juga diberikan oleh Menteri Luar Negeri Luxembourg, Jean Asselborn. *"Tidak manusiawi apabila Eropa menutup mata, setiap negara anggota UE memiliki tugasnya*

masing-masing (FT, 2016),” ujarnya.

Freidrich Ebert Stiftung dalam laporan berjudul *Migration Narratives In Europe* menganalisis wacana publik mengenai sentimen migrasi. Dalam laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa narasi masyarakat Eropa memiliki sikap anti-migrasi yang tegas. Bahkan tidak ditemukan gerak mencolok dari pembicaraan yang mengarah pada dukungan terhadap migrasi (Friedrich Ebert Stiftung, 2019). Selain itu, narasi keamanan dan identitas lebih besar dibahas oleh masyarakat Eropa karena selaras dengan sentimen anti-migrasi.

Upaya membangun narasi anti-imigran tersebut dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama adalah menghancurkan narasi kemanusiaan. Wacana migrasi di Eropa selalu didominasi oleh aspek keamanan dan identitas. Diskursus yang berkembang dalam ranah akademis perlahan telah mengkaji bentuk migrasi sebagai bagian dari sekuritisasi. Upaya untuk melabelkan sekuritisasi dalam isu migrasi tidak terlepas dari kepentingan atas produksi kebenaran melalui pembentukan wacana yang terkait relasi kuasa (Ibrahim, 2014). Relasi kuasa berusaha untuk memperluas konsep keamanan dan keterkaitan risiko dengan ancaman terhadap migran. Pada akhirnya, sekuritisasi migrasi telah mengambil bentuk nyata melalui kebijakan pemerintah. Redupnya narasi kemanusiaan dilakukan dengan cara memanfaatkan disinformasi untuk mempertahankan kemarahan dan ketakutan masyarakat (Juhász & Szicherle, 2017). Kedua, kelompok sayap kanan berusaha membangun sentimen emosional anti-imigran dengan cara menciptakan dikotomi “kami vs mereka”. Upaya ini memungkinkan masyarakat untuk mengagungkan identitasnya dan mengaitkannya dengan masalah ekonomi, politik dan sosial akibat kedatangan “mereka” (kelompok

imigran) (La Barbera, 2015). Akibatnya, solusi penghentian arus migrasi menjadi upaya yang efektif yang ditawarkan kelompok sayap kanan kepada masyarakat. Ketiga adalah mengupayakan legitimasi terhadap narasi dibandingkan fakta. Pernyataan narasi yang sarat emosi dianggap lebih dipercaya dibandingkan fakta yang beredar tentang masalah migrasi (Friedrich Ebert Stiftung, 2019). Hal ini berdampak pada informasi yang diterima oleh masyarakat Eropa. Keempat, sikap anti elitis dan pola disinformasi yang digunakan terus mengikis kepercayaan ke media mainstream dan institusi publik seperti UE. Pemberitaan media yang sering mengandalkan sumber kunci dari pemimpin negara atau tokoh politik mempengaruhi framing yang dibangun oleh media. Kemenangan partai sayap kanan di beberapa negara di Eropa membuat pembingkai berita mengenai imigran cenderung negatif. Seperti contoh, umumnya media-media menampilkan migran sebagai penjahat dan pusat konflik masyarakat Eropa (Castles, 2012; Eberl, 2018)

Narasi Anti-Imigran Sebagai Gambaran Krisis Identitas Eropa

Krisis pengungsi 2015 telah menjadi cermin bagi masyarakat Eropa, memaksa mereka untuk bertanya pada diri sendiri: siapa mereka, dan bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka (Nougayredem, 2016). Upaya masyarakat Eropa untuk mendefinisikan identitasnya akan berkaitan erat dengan pembentukan identitas kolektif masyarakat Eropa. Tantangan pembentukan identitas Eropa dilandasi pada dua hal (Bakke, 1995, p.22). Pertama, kejelasan visi objektif dari identitas. Kedua, identitas Eropa harus merembes ke seluruh populasi. Keberhasilan

integrasi Eropa juga harus dilihat tidak hanya dari konsensus elit negara anggota, tetapi juga keberhasilan dalam menanamkan nilai sukarela terhadap masyarakat Eropa. Karena pada dasarnya, kekuatan identitas Eropa terletak pada rasa solidaritas elemen politik di dalamnya dalam menciptakan integrasi ekonomi, politik, hingga sosial-budaya (Bakke, 1995, p. 25)

Identitas adalah sebuah konstruksi dari proses politik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui siapa yang mempromosikan identitas dan kenapa ada pihak-pihak yang menolak. Selain itu, identitas adalah sesuatu yang performatif. Karena dapat dikatakan bahwa tidak ada identitas kolektif yang lengkap, terbatas dan sempurna. Identitas adalah representasi kepentingan aktor pembuat yang dikonstruksikan dan dipengaruhi oleh persepsi (Wintle, 2004). Anggota kelompok dalam sebuah komunitas berusaha mengidentifikasi diri dan mendefinisikan karakteristik mereka sendiri. Tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, pada tahap ini, terdapat sebuah proses "*othering*". Dalam proses ini, terbentuklah sebuah narasi "*kami vs mereka*". (Wintle, 2004) Dalam perspektif yang sempit, ide-ide ini dapat dilihat dari perbandingan fisik individu, persepsi stereotip, hingga kebudayaan yang mengakar.

Pelacakan atas sejarah pembentukan identitas Eropa dilakukan dengan melihat bagaimana sejarah migrasi mampu masuk ke dalam tataran nilai-nilai negara di Eropa. Sejarah kolonialisme telah membuat pola migrasi terbangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa, terutama dalam sejarah industrialisasi Eropa sejak abad ke-19 (Castles, 2012). Beberapa negara kolonial seperti Inggris, Belanda, Belgia, hingga Perancis mengimpor tenaga kerja/budak dari negara-negara yang mereka jajah. Pasca perang

dunia berakhir, kelompok-kelompok migran ini hidup menetap di negara kolonial tersebut. Selain itu, terdapat jenis imigran yang baru, dengan motif untuk mencari tempat hidup yang lebih baik. Kelompok-kelompok ini membawa praktik agama dan budaya mereka masing-masing. Berdasarkan kondisi di atas, upaya penghargaan atas keberagaman budaya, etnis, dan agama dilakukan negara di Eropa dengan cara mengadopsi pendekatan multikulturalisme (Khin, 2019, p. 5).

Di Inggris, upaya untuk mengadopsi multikulturalisme dilakukan dengan cara mengintegrasikan imigran ke dalam masyarakat Inggris. Langkah ini dilakukan tanpa ada tuntutan kepada mereka untuk berasimilasi dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan praktik budaya mereka (Khin, 2019, p. 6). Sedangkan di Perancis, upaya pengadopsian multikulturalisme sangat bergantung pada rezim politik yang memegang tampuk kekuasaan. Saat dipimpin oleh Presiden Francois Mitterrand yang berideologi sosialisme, Perancis menekankan hak atas perbedaan kepada kelompok imigran (Khin, 2019, p. 7). Akan tetapi saat dipimpin oleh kelompok konservatif pada tahun 1980-an, pemerintah Perancis memaksakan kelompok migran untuk berasimilasi terhadap nilai-nilai nasionalisme Perancis. Upaya ini dilakukan akibat ketakutan atas tergerusnya identitas nasional. Kegagalan asimilasi tersebut berdampak pada diskriminasi rasial atas hak masyarakat migran. Pemerintah Perancis tidak mengakui imigran dalam komunitas terstruktur, dan memastikan bahwa seluruh kelompok imigran harus mengadopsi nilai-nilai bahasa, budaya dan sekularisasi Perancis. Sedangkan di Jerman, upaya terhadap pengakuan kelompok minoritas imigran dilakukan pasca

tahun 1998, saat koalisi pemerintahan Sosial Demokrat dan Partai Hijau memimpin negara tersebut. Melalui UU Kewarganegaraan Tahun 2000 dan UU Keimigrasian Tahun 2005, Jerman menjamin perlindungan kebebasan beragama dan mempromosikan toleransi budaya (Khin, 2019, p. 8). Selain itu Jerman juga menjamin pendidikan multikultural dinormalisasi di sekolah melalui pelajaran bahasa ibu untuk anak-anak migran. Akan tetapi sama seperti Perancis, kelompok minoritas migran di Jerman harus mengakui dan menjalankan nilai-nilai ke-Jerman-an (*Leitkultur*), yaitu penerapan prinsip liberal, mengetahui bahasa Jerman, dan mematuhi aturan hukum (Khin, 2019).

Dalam lingkungan regional, upaya pembentukan identitas Eropa tidak bisa dilepaskan dari peran UE. Sebagai lembaga supranasional, UE memberikan panduan perekatan identitas negara-negara anggota. UE dibangun oleh moto *In varietate concordia* (bersatu dalam perbedaan) (Euexperts-Bruxelles, 2019). Moto inilah yang memayungi setiap upaya integrasi identitas, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dilakukan oleh UE (Tusk, 2019). Dalam Traktat Maastricht poin 3, UE memiliki tujuan, yaitu menjaga perdamaian global, keamanan dan perlindungan hak asasi manusia dan tujuan internal yaitu area kebebasan tanpa batas, kesejahteraan, keadilan dan kohesi sosial (Kuhnhardt, 2008). Identitas Eropa dibangun melalui nilai dan norma yang dimiliki oleh perspektif liberal. Oleh karena itu, upaya ini terus dilakukan melalui integrasi di bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga penyatuan simbol seperti bendera dan lagu kebangsaan. UE juga berusaha mengedepankan multikulturalisme sebagai tujuan dari integrasi Eropa. Tujuan ini didasarkan pada kondisi bahwa

Eropa adalah negara beragam, masyarakat yang bertumpu pada multi etnis maupun multi rasial. Penghargaan atas keberagaman tersebut diperlukan untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi pembentukan identitas regional. Walaupun begitu, terdapat banyak kritik atas proyek tersebut. Seperti bagaimanakah peran budaya nasional yang semakin terkikis, kurangnya penerimaan terhadap etnis minoritas migran, hingga faktor sosial ekonomi yang tidak berpihak secara adil? (Castles, 2012). Pada kesimpulannya, identitas Eropa yang dikonstruksikan oleh UE membuktikan bahwa identitas Eropa bersifat inklusif, menerima perbedaan, dan berusaha secara utuh untuk menekankan pendekatan multikulturalisme sebagai solusi atas keberagaman etnis, agama, ras yang terdapat di dalam masyarakat Eropa.

Peneliti multikulturalisme, Will Kymlicka berpendapat bahwa kelompok-kelompok minoritas terdiri dari minoritas nasional atau bangsa minoritas, yang melestarikan budaya yang diperlukan untuk rasa identitas (1995). Upaya hak-hak minoritas tersebut dapat terlihat dari berbagai negara bagian yang beberapa negara yang berhasil untuk menguatkan otonominya untuk mempertahankan eksistensi identitas. Akan tetapi, hak-hak terhadap minoritas masih terlihat sulit untuk diaplikasikan terhadap beberapa kelompok minoritas seperti imigran. Karena upaya untuk mengadvokasi kepentingan kelompok minoritas hanya berjalan dengan baik dengan tujuan untuk mencegah kelompok tersebut memisahkan diri dari negara-negara multinasional, sedangkan kelompok migran tidak memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu, definisi hak kelompok migran dalam negara demokratis pada akhirnya selalu dipaksa untuk mengikut bagian dari budaya nasional itu sendiri

(Joppke, 2001, p. 436). Selain itu, kegagalan sebuah negara untuk mengintegrasikan hak-hak imigran akan berakhir pada terciptanya kebijakan-kebijakan negara yang mendiskriminasi keyakinan dan praktik kelompok imigran.

Selain itu, terdapat akar permasalahan dalam upaya pembentukan identitas di tataran regional, yaitu UE tidak memiliki hak prerogatif dan kekuasaan yang mirip dengan negara. UE memiliki proses pengambilan keputusan yang lambat dan menjadi lembaga kompleks yang hanya efektif dalam sistem hubungan multilateral yang dikuasai oleh pemerintah (Castles, 2012). Akibatnya, penguatan nasionalisme yang terjadi di negara-negara Eropa mampu hadir kapanpun dan membatasi ide-ide kosmopolitanisme yang dibawa oleh UE. Kondisi ini dapat dilihat saat Inggris pada akhirnya lebih memilih untuk keluar dari regionalisme tersebut pada tahun 2016. Brexit membuktikan bahwa ide-ide kosmopolitan mendapatkan kritikan yang cukup tajam dan gagasan nasionalisme “sempit” kembali menguat. Kritikan tersebut terkait ketidakadilan kebijakan regional yang kurang menguntungkan kepentingan negara-negara anggotanya.

Segala kelemahan mendasar dalam proses pembentukan identitas UE pada akhirnya sangat terkait dengan makin menguatnya gelombang gerakan populis dan partai-partai di seluruh Eropa. Kelompok tersebut acap kali menyerang berbagai kebijakan integrasi maupun tata kelola yang diajukan oleh UE yang dianggap gagal. Narasi anti-imigran membuktikan bahwa terjadi kondisi krisis pada identitas Eropa. Di mana, narasi anti-imigran menciptakan kesempatan politik bagi kekuatan politik sayap kanan yang mengkritik bentuk integrasi identitas Eropa. Kesempatan

politik yang dimiliki oleh sayap kanan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menutup narasi alternatif yang mendukung arus migran. Pembentuk narasi anti-imigran berhasil meraih dukungan masyarakat karena berkaitan erat dengan hajat hidup masyarakat secara umum seperti kemiskinan, keamanan, dan resistensi budaya. Narasi-narasi ini pada akhirnya mengalahkan narasi tandingan yang berkaitan dengan kemanusiaan maupun tata kelola migrasi yang ideal.

Kebangkitan politik sayap kanan juga membuktikan bahwa upaya kohesi sosial yang dilakukan UE melalui proyek multikulturalisme mendapatkan kritik tajam. Pertama, upaya homogenisasi masyarakat Eropa yang beragam merupakan hal yang sulit dan utopis. Kedua, walau UE berusaha membangun identitas Eropa yang inklusif, kebijakan negara dan penerimaan masyarakat membuat kelompok minoritas migran berada di posisi yang rentan, terutama dilihat dari masyarakat mayoritas yang terpapar oleh pandangan politik sayap kanan. Kegagalan institusi regional untuk menciptakan tata kelola migrasi yang ideal pada akhirnya berkaitan langsung dengan masalah identitas yang dihadapi Eropa. Identitas Eropa tidak lagi mampu merekatkan masyarakat Eropa untuk mengawal tujuan integrasi melalui multikulturalisme dan penghargaan terhadap keberagaman. Sebaliknya, kegagalan menciptakan penghormatan atas keberagaman menjadikan posisi migran di Eropa sebagai kelompok rentan akan tetap berlanjut.

Kesimpulan

Puncak kedatangan pengungsi menuju Eropa pada tahun 2015 telah membuka perdebatan mengenai dampak yang diterima

oleh masyarakat. Perdebatan berkisar pada wacana baik-buruknya dampak migrasi yang memunculkan narasi anti-imigran. Dari pembacaan berbagai literatur, penulis berargumen bahwa aktor utama meningkatnya narasi anti-imigran adalah kelompok politik sayap kanan yang terdiri dari partai politik, gerakan sosial, dan komunitas yang menganut ideologi konservatif yang cenderung anti-migran, anti-Islam, anti-Yahudi, nasionalis fasis, dan xenofobia. Narasi yang dimainkan kelompok tersebut yaitu dengan mengaitkan migrasi sebagai ancaman bagi keamanan, identitas, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat di tiap negara. Kelompok tersebut melakukan pembingkai isu dengan menyatakan bahwa humanitarianisme adalah ancaman tersembunyi terhadap identitas Eropa. Dampak yang dihasilkan dari pembingkai tersebut antara lain; (1) menciptakan ketakutan; (2) menciptakan dikotomi kami vs mereka; (3) meningkatkan kekuatan narasi dibandingkan fakta; dan (4) sikap anti-elit dan anti-institusi.

Tindakan yang dilakukan kelompok politik sayap kanan di atas adalah bentuk refleksi dari krisis identitas yang dihadapi oleh Eropa. Krisis pengungsi 2015 telah menjadi cermin bagi masyarakat Eropa bahwa terdapat kelemahan penting terhadap proses pembentukan identitas yang dipromosikan oleh UE. Narasi anti-imigran merefleksikan bagaimana sulitnya UE untuk menciptakan tata kelola migrasi yang ideal. Upaya diskriminatif dan aksi kekerasan yang dihasilkan oleh narasi anti-imigran juga merefleksikan salah satu bentuk krisis identitas Eropa, yaitu gagalnya proyek multikulturalisme dan penghargaan atas keberagaman masyarakat Eropa. Ketidakmampuan UE sangat bergantung terhadap kondisi ekonomi, keamanan, dan politik yang dihadapi masyarakat Eropa.

Kegagalan tersebut berhasil dikapitalisasi oleh kelompok politik sayap kanan. Menurut analisis penulis, dibutuhkan pendekatan yang lebih ideal untuk menerima tantangan keberagaman. Proyek multikulturalisme yang telah dijalankan terbukti meninggalkan celah yang cukup besar, terutama terkait tidak maksimalnya pengakuan atas kelompok minoritas migran. Oleh karena itu, UE harus membangun kerja sama yang sinergis dengan kelompok politik sayap kiri maupun tengah negara anggota untuk menutup kesempatan politik yang dimiliki kelompok politik sayap kanan. Upaya ini dilakukan karena kesempatan politik yang didapatkan oleh politik sayap kanan akan berdampak pada terhalangnya program integrasi Eropa dan penguatan tata kelola migrasi yang ideal bagi negara-negara anggota dan regional.

Daftar Pustaka

- Andre, V. (2015). Merah and Breivik: A Reflection of the European Identity Crisis. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 26(2), 183–204. <https://doi.org/10.1080/09596410.2015.1015246>
- Altomonte, C., & Villafranca A. (2019). *Europe in Identity Crisis. The Future of the EU in the Age of Nationalism*. Milan: Ledizioni LediPublishing
- Bakke, Elisabeth. (1995). *Towards a European Identity?* dalam *Arena Working Paper No. 10/1995* hlm 22
- Barrera, R., Z. (2019) Rebooting European Identity: Intercultural Citizenship For Building The Future Of A Diverse Europe, *Journal of Contemporary European Studies*, DOI: 10.1080/14782804.2019.1686346

- BBC. (2016). Migrant Crisis: Migration To Europe Explained In Seven Charts. Diakses pada tanggal 1 April 2020 dari: <https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>
- BBC.(2017). EU To Sue Poland, Hungary And Czechs For Refusing Refugee Quotas. Diakses pada tanggal 20 Maret 2019 dari: <https://www.bbc.com/news/world-europe-42270239>
- Bhugra, D. (2004). Migration, Distress And Cultural Identity. *British Medical Bulletin*, 69, 129–141. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldh007>
- Butinni, C. (2019). There's No End In Sight For Matteo Salvini's War On Migrants. Diakses pada tanggal 7 Juni 2020 dari: <https://foreignpolicy.com/2019/08/21/theres-no-end-in-sight-for-matteo-salvinis-war-on-migrants-league-liga-open-arms-rescue-ships-mediterranean-libya/>
- Caiani, M. Della, M. P. & Wagemann, C. (2012). Mobilizing on the Extreme Right: Germany, Italy, and the United States. New York: Oxford University Press
- Castles, S. (2010). Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(10), 1565–1586. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2010.489381>
- Castles, S. (2012). Immigration and Asylum: Challenges to European Identities and Citizenship. *The Oxford Handbook of Postwar European History*, April 2018, 1–21. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560981.013.0010>
- Creighton, M. (2016). Prominence And Exclusivity: Identity And Opposition To Immigration In A Multinational Context, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42:3, 458-479, DOI:

10.1080/1369183X.2015.1063992

- DW. (2018). Italian Interior Minister Matteo Salvini: Italy Not 'Europe's Refugee Camp'. Diakses pada tanggal 8 Juni 2020 dari: <https://www.dw.com/en/italian-interior-minister-matteo-salvini-italy-not-europes-refugee-camp/a-44062004>
- Eberl, J. M (Ed.). (2018). The European Media Discourse On Immigration And Its Effects: A Literature Review, *Annals of the International Communication Association*, 42:3, 207-223, DOI: 10.1080/23808985.2018.1497452
- Elliott, A. (2019). Ireland's Evolving Migration Policies: Building Alliances And A Liberal European Identity Through The EU Migration Policy Crisis, *Irish Political Studies*, 34:4, 551-574, DOI: 10.1080/07907184.2019.1647172
- Euexperts-Bruxelles.(2019). The European Identity Crisis: Serious O Just Structural? Diakses pada tanggal 10 April 2019 dari: <https://euexperts.eu/2019/02/20/the-european-identity-crisis-serious-o-just-structural/>
- Eunews. (2014). Interview with Marine Le Pen: 'I Don't Want this European Soviet Union'. Diakses pada tanggal 6 Juni 2020 dari: <https://www.eunews.it/rassegna-stampa-europa/interview-with-marine-le-pen-i-dont-want-this-european-soviet-union>
- European Commission.(2015). Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions: A European Agenda On Migration
- Financial Times. (2016). Europe shows a harder face on migration as political mood shifts. Diakses dari: <https://www.ft.com/content/13fe6554-5ee9-11ea-b0ab-339c2307bcd4>

- Financial Times. (2020). Marine Le Pen Promises Crackdown On Immigration And Globalisation. Diakses dari: <https://www.ft.com/content/9854f5e4-ebc3-11e6-930f-061b01e23655>
- Friedrich Ebert Stiftung. (2019). Migration Narratives In Europe: Through Conversations On Public Social Media. Diakses pada tanggal 12 April 2019 dari: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/15374-20190510.pdf>
- Hogan, J & Haltinner, K. (2015). Floods, Invaders, and Parasites: Immigration Threat Narratives and Right-Wing Populism in the USA, UK and Australia, *Journal of Intercultural Studies*, 36:5, 520-543, DOI: 10.1080/07256868.2015.1072907
- Grande, E., Schwarzbözl, T., & Fatke, M. (2019). Politicizing Immigration In Western Europe. *Journal of European Public Policy*, 26(10), 1444–1463. <https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1531909>
- Ibrahim, M. (2005), The Securitization of Migration: A Racial Discourse1. *International Migration*, 43: 163-187. doi:10.1111/j.1468-2435.2005.00345.x
- Jenkins, R. (2008). The Ambiguity Of Europe dalam *European Societies*, 10(2), 153–176. doi:10.1080/14616690701835253
- Joppke, C. (2001). Multicultural Citizenship: A Critique. *European Journal Of Sociology / Archives Européennes De Sociologie / Europäisches Archiv Für Soziologie*, 42 (2), 431-447.
- Juhasz, A. & Szicherle, P (2017) The political effects of migration-related fake news, disinformation and conspiracy theories in Europe, Budapest: Identity and Migration in Europe: Multidisciplinary Perspectives
- Kuhnhardt, L. (2008). Crises in European Integration: Challenges and Responses, 1945-2005. New York: Berghahn Books hlm 56

- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship*. New York: Oxford University Press
- La Barbera, M. (2015). *Identity and Migration in Europe: Multidisciplinary Perspectives*. London: Springer
- Lutz, P. (2019) Variation In Policy Success: Radical Right Populism And Migration Policy dalam *West European Politics*, 42:3, 517-544, DOI: 10.1080/01402382.2018.1504509
- Nougayrede, N. (2016). Refugees Aren't The Problem. Europe's Identity Crisis Is. Diakses pada tanggal 10 April 2019 dari: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/31/refugees-problem-europe-identity-crisis-migration>
- Pew Research. (2014). In Europe, Sentiment Against Immigrants, Minorities Runs High. Diakses pada tanggal 10 April 2020 dari: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/05/14/in-europe-sentiment-against-immigrants-minorities-runs-high/>
- Pewresearch. (2016). Number Of Asylum Seekers In Europe Surges To Record 1.3 Million In 2015. Diakses pada tanggal 11 April 2019 dari: https://www.pewresearch.org/global/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/pgm_2016-08-02_europe-asylum-01/
- Reuters. 2019. Poland, Hungary Broke EU Laws By Refusing To Host Migrants: Court Adviser. Diakses pada tanggal 12 April 2019 dari: <https://www.reuters.com/article/us-europe-migration-court/poland-hungary-broke-eu-laws-by-refusing-to-host-migrants-court-adviser-idUSKBN1XA1S5>
- The Guardian. (2020). Immigration Attitudes Have Barely Changed – So Why Is Far Right On Rise? Diakses pada tanggal 6

- Juni 2020 dari: <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/02/immigration-attitudes-have-barely-changed-why-far-right-on-rise>
- The Local FR. (2017). 'Give us France back': Le Pen delights frenzied crowd in Paris with anti-immigration speech. Diakses pada tanggal 8 Juni 2020 dari: <https://www.thelocal.fr/20170418/le-pen-immigration-has-been-a-tragedy-for-france>
- Tusk, D. 2019. Pidato Hari Konstitusi di Universitas Warsaw. Diakses pada tanggal 2 April 2019 dari: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/03/speech-given-by-president-donald-tusk-at-the-university-of-warsaw-on-the-occasion-of-3-may-constitution-day/>
- UNHCR. (2015). Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five European Countries. Diakses dari: <https://www.unhcr.org/56bb369c9.pdf>
- UNHCR. (2015). Total number of Syrian refugees exceeds four million for first time Diakses dari: <https://www.unhcr.org/news/press/2015/7/559d67d46/unhcr-total-number-syrian-refugees-exceeds-four-million-first-time.html>
- Van Der Brug, W., Fennema, M., & Tillie, J. (2000). Anti-Immigrant Parties In Europe: Ideological Or Protest Vote? dalam *European Journal of Political Research*, 37(1), 77–102. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.00505>
- Vieten, U. M., & Poynting, S. (2016). Contemporary Far-Right Racist Populism in Europe dalam *Journal of Intercultural Studies*, 37(6), 533–540. <https://doi.org/10.1080/07256868.2016.1235099>

- Wallis, E. (2020). Anti-Migrant 'Salvini Laws' Are Still In Use In Italy. Diakses pada tanggal 7 Juni 2020 dari: <https://www.infomigrants.net/en/post/22211/anti-migrant-salvini-laws-are-still-in-use-in-italy>
- Washington Post. (2019). European centrists are tacking right on immigration. It's a dangerous strategy. Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 dari: <https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/10/01/european-centrists-are-tacking-right-immigration-its-dangerous-strategy/>
- Wintle, M. (2004). European Identity: A Threat to the Nation? Diakses pada tanggal 12 April 2019 dari: <https://ejop.psychopen.eu/index.php/ejop/article/view/363/html>
- Zimmermann, K. F., & Spring, N., (2016). Tackling the European Migration Problem dalam *Tackling the European Migration Problem*. 9(2), 45–62.

